BkkbN

KAMPUNG KB SEBAGAI UPAYA BERSAMA

UNTUK INDONESIA SEJAHTERA

(LAPORAN AKHIR KAMPUNG KB 2018)



Direktorat Bina Lini Lapangan

2019

KAMPUNG KB SEBAGAI UPAYA BERSAMA

UNTUK
INDONESIA SEJAHTERA

(LAPORAN AKHIR TAHUN KAMPUNG KB 2018)



DIREKTORAT BINA LINI LAPANGAN

Pelindung : M. Yani (Plt. Deputi Bidang ADPIN)

Penangggungjawab : Wahidin (Dir. Bina Lini Lapangan)

Editor : Ade Anwar

Penyusun : Yusna Afrilda

Farah Adibah

Gyakuni Firsty Niko

Design : Ari Nurdin

60hlm; 18cmx25cm

KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kemudahan kepada kita semua untuk dapat menyelesaikan buku ***KAMPUNG KB SEBAGAI UPAYA BERSAMA UNTUK INDONESIA SEJAHTERA*** sebagai laporan perkembangan Kampung KB tahun 2018.

Buku ini disusun berdasarkan data laporan *online* pada *website* kampungkb.bkkbn.go.id yang di unduh pada tanggal 14 Januari 2019. Memuat tentang jumlah dan sebaran kampung KB di seluruh Indonesia, intervensi kegiatan yang berdampak pada capaian Program KKBPK dan lintas sektor, serta tantangan dan solusi yang telah diupayakan agar Kampung KB dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai salah satu bahan rujukan untuk perbaikan perencanaan dan pengelolaan Kampung KB.

Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta meridhai niat dan usaha kita bersama.

Direktur Bina Lini Lapangan



Drs. Wahidin, M.Kes

KATA SAMBUTAN



KATA SAMBUTAN

Kampung KB merupakan upaya bersama pemerintah dengan masyarakat dalam rangka upaya pelaksanaan nawacita pemerintah yang diawali dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (cita ke-3) untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (cita ke-5) dengan melakukan revolusi karakter bangsa melalui pendekatan keluarga (cita ke-8). Dengan memperhatikan hal tersebut maka, saya sangat mengapresiasi atas segala upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta seluruh *stakeholder* dalam mendukung keberadaan Kampung KB seperti yang terekam dalam *website* Kampung KB selama tahun 2018.

Buku ini memuat tentang proses pengelolaan dan capaian yang telah diraih oleh Kampung KB dengan berbagai kemudahan dan kendala yang dilalui oleh masing-masing provinsi. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerjasama yang baik antar lintas lembaga pemerintahan dan non pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan desa, sehingga dampak program pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Besar harapan kami dengan mencermati isi buku, dapat memperkuat komitmen kita untuk terus menghadirkan diri bagi masyarakat di level desa.

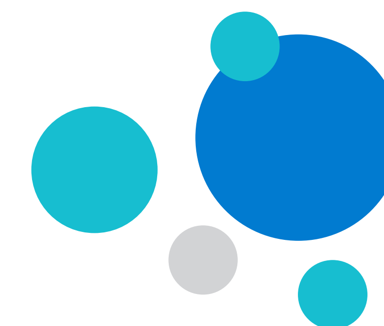
Kepada semua pihak yang telah dengan tekun menyusun buku ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan. Jerih payah dan kerja cerdas Saudara-saudara adalah bagian dari upaya bersama untuk Indonesia Sejahtera.

Plt. Deputi Bidang Advokasi
Penggerakan dan Informasi,

Dr. dr. M. Yani, M.Kes., PKK



DAFTAR ISI



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Profil Indonesia pada tahun 2015 dari berbagai sumber yang dikeluarkan oleh pusat data diketahui bahwa 64 persen desa di Indonesia termasuk desa sangat tertinggal dan desa tertinggal, 11,13 persen jumlah penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan, 35,6 persen balita menderita stunting dan rata-rata lama sekolah masih rendah (7,9 tahun), artinya rata-rata penduduk Indonesia tidak menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Gambaran kondisi di atas tentu tidak terlepas dari akibat banyaknya jumlah penduduk dan tingginya angka kelahiran nasional khususnya di daerah perdesaan. Kondisi tersebut sangat rentan dan membutuhkan pendekatan kebijakan afirmatif, khusus, dan tidak seragam karena kompleksitas masalah yang dihadapi.

Dalam upaya penyelesaian masalah, perlu komitmen bersama antar seluruh komponen bangsa dengan pendekatan berbasis keluarga dan mengutamakan partisipasi aktif masyarakat, sehingga Presiden mengamanatkan perlu upaya kreatif dan integratif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui *beyond family planing* yang bermula dari daerah dan desa. *Beyond family planing* adalah kegiatan-kegiatan yang menjangkau lebih jauh dari kontrasepsi, seperti perbaikan gizi, peningkatan pendapatan dan lain-lain yang dapat mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Untuk itu, Presiden RI mengamanatkan kepada BKKBN dalam rangka melaksanakan tugas pengendalian penduduk, menyelenggarakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sekaligus mengambil bagian dalam penyelesaian masalah bangsa melalui pendekatan keluarga agar mencanangkan Kampung Keluarga Berencana.

> *“Kompleksnya masalah pembangunan wilayah dan pembangunan manusia membutuhkan pendekatan kebijakan afirmatif, khusus, dan tidak seragam”*



Merespon amanat Presiden RI tersebut, dan menyadari bahwa pengentasan masalah pembangunan dan masalah kependudukan tidak dapat dilakukan secara parsial, maka BKKBN berkoordinasi dengan lintas sektor. Sehingga pada tanggal 14 Januari 2016, Presiden RI dengan didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan serta Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon meresmikan Kampung KB sebagai gerakan bersama untuk membangun wilayah dan masyarakat dengan pendekatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat menuju Indonesia berkualitas dan sejahtera.

"Kampung KB sebagai gerakan bersama untuk membangun wilayah dan masyarakat dengan pendekatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat menuju Indonesia berkualitas dan sejahtera"

Gerakan bersama pemerintah dengan masyarakat di Kampung KB merupakan salah satu wujud kerja nyata yang dilakukan oleh lintas sektor dan pemerintah daerah dalam rangka upaya pelaksanaan nawacita, khususnya nawacita 5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan melakukan revolusi karakter bangsa melalui pendekatan keluarga (cita 8) yang diawali dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (cita 3).



Kampung KB digagas pada akhir tahun 2015 dan perencanaannya dirumuskan dalam peta jalan sampai dengan tahun 2019. Target tahun 2016 pencanangan di setiap kabupaten kota, selanjutnya tahun 2017 ditargetkan setiap kecamatan memiliki satu Kampung KB; kemudian tahun 2018 ditargetkan lima puluh persen atau sebanyak 6.727 desa sangat tertinggal di Indonesia memiliki Kampung KB; serta pada tahun 2019 seluruh desa sangat tertinggal memiliki Kampung KB. Namun pada pertengahan tahun 2018, target tahun 2019 di revisi untuk refocusing program kepada peningkatan kualitas kampung KB dengan menjadikan 514 Kampung KB di setiap kabupaten dan kota menjadi Kampung KB Percontohan.

1. Indeks Desa Membangun, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, 2015
2. Profil Kemiskinan di Indonesia, BPS, Sep 2015;
3. Riskesdas – 2013
4. Human Development Report, UNDP, 2016



Penentuan Kampung dipilih berdasarkan kriteria khusus yaitu jumlah keluarga pra sejahtera di atas rata-rata, dan jumlah peserta KB dibawah rata-rata capaian kecamatan dimana kampung tersebut berlokasi. Biasanya wilayah dengan kriteria tersebut di atas berada di daerah kumuh, pesisir, daerah aliran sungai, bantaran kereta api, kawasan miskin, terpencil, perbatasan, kawasan industri, padat penduduk, desa stunting dan desa sangat tertinggal/tertinggal.

Untuk melihat perkembangan pembentukan dan pengelolaan Kampung KB, maka bersama ini kami sampaikan laporan akhir tahun 2018.

A. Tujuan Laporan
1) Melaporkan perkembangan pembentukan Kampung KB sebagaimana target yang tertuang dalam peta jalan Kampung KB;
2) Menggambarkan proses pengelolaan Kampung KB;
3) Mengevaluasi permasalahan dalam pembentukan dan pengelolaan Kampung KB.

B. Sasaran Laporan
1. Komponen BKKBN
2. Mitra terkait

C. Ruang Lingkup Laporan
1. Laporan sebaran Kampung KB
2. Laporan operasional Kampung KB
3. Permasalahan pembentukan dan pengelolaan Kampung KB
4. Kesimpulan dan saran





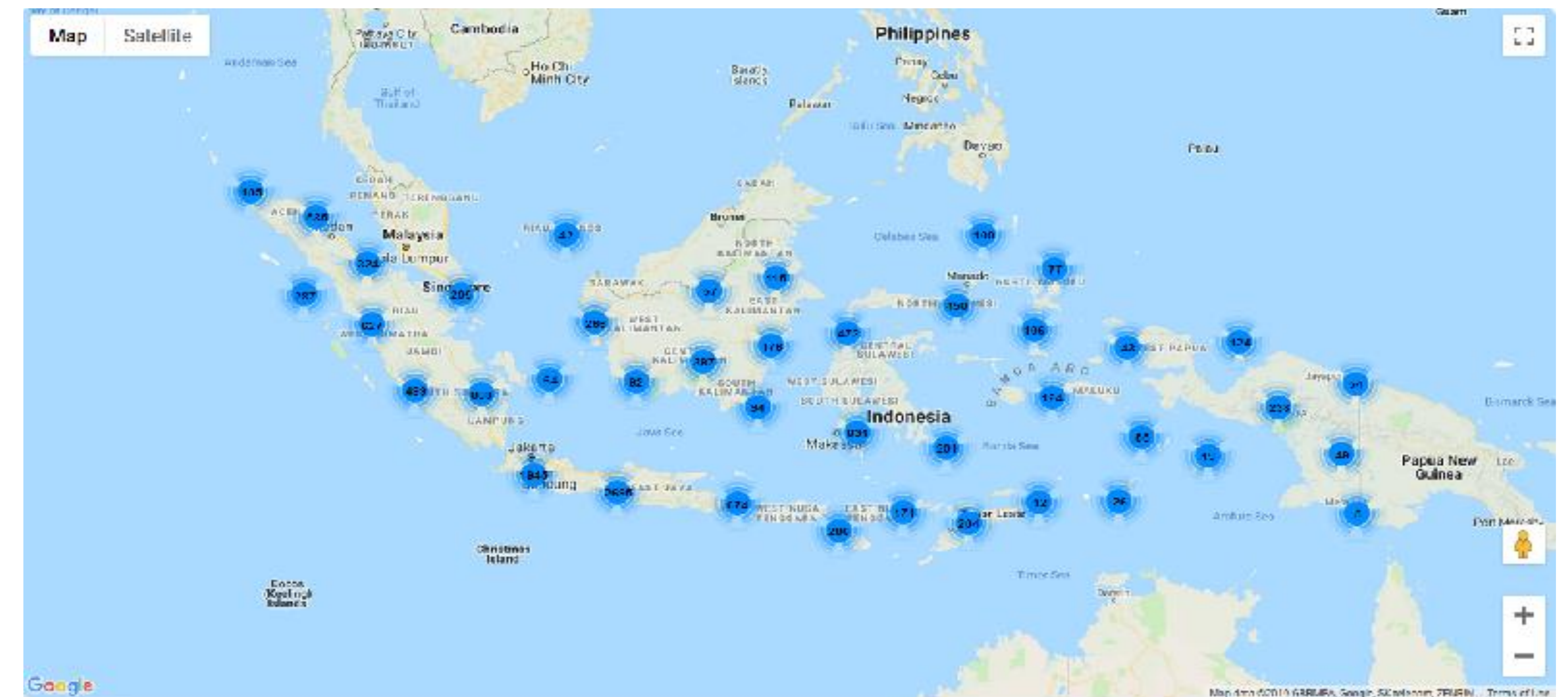
Gapura setinggi 3 meter berdiri kokoh di perlintasan jalan menuju Dusun Pasirnagara, Desa Cibeureum, Kota Banjar – Jawa Barat

BAB II
PERKEMBANGAN KAMPUNG KB



PERKEMBANGAN
KAMPUNG KB

PERSEBARAN KAMPUNG KB

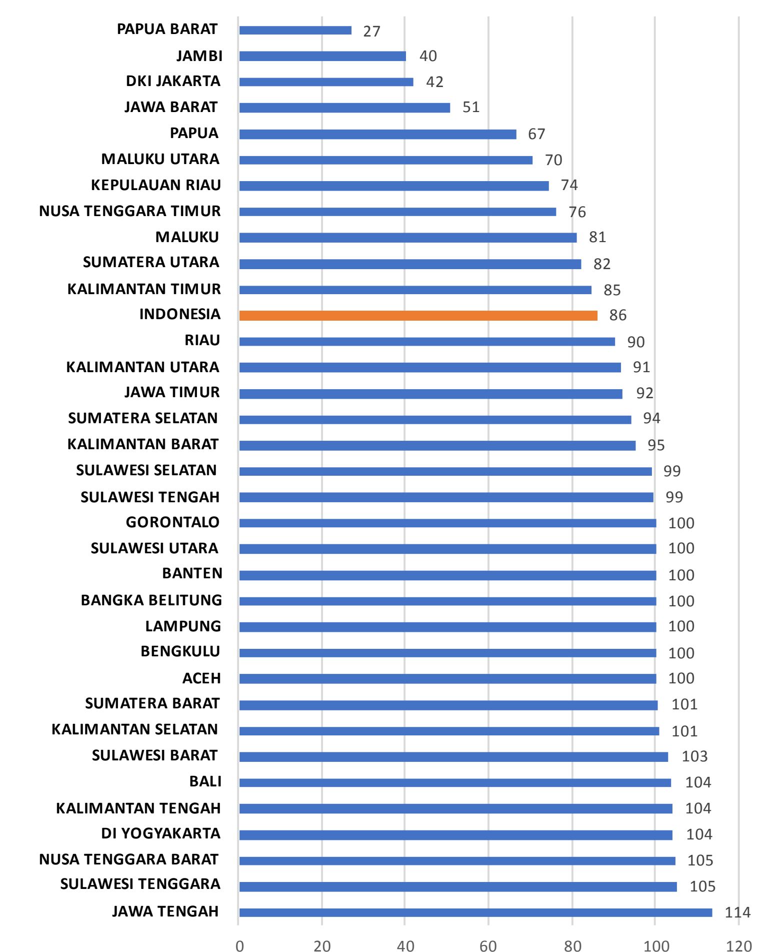


A. Jumlah dan distribusi Kampung KB di Indonesia

Jumlah Kampung KB sampai dengan Desember 2018 sudah mencapai 13.679 Kampung KB yang sebar di seluruh Indonesia.

Tahun 2018 ditargetkan 6.727 desa sangat tertingal/ tertinggal memiliki satu kampung KB dan 1000 diantaranya merupakan desa *stunting*. Berdasarkan laporan Desember 2018 tercatat 86 persen atau dengan kata lain 5.779 desa telah memiliki Kampung KB. Namun jika berdasarkan jumlah yang telah dicanangkan total seluruhnya adalah 13.679 Kampung KB.

Berdasarkan grafik di atas, tampak bahwa Provinsi Papua Barat merupakan provinsi dengan capaian yang paling rendah yaitu sebesar 27 persen, artinya dari 197 desa yang ditargetkan yang ada, hanya 53 desa yang memiliki Kampung KB. Rendahnya capaian pembentukan Kampung KB diantaranya disebabkan oleh jarak antar desa sangat jauh dan sulit dijangkau sehingga membutuhkan banyak sumber daya, sedangkan sumber daya yang tersedia untuk pencanangan sangat terbatas; OPDKB kabupaten dan kota lebih memilih untuk peningkatan kualitas Kampung KB yang telah terbentuk; serta masih ada Kampung KB yang belum terlapor secara online. Disisi lain, advokasi kepada pemerintah daerah tentang Kampung KB juga mengalami kendala karena terkait isu program KKBPK.



Gambar 2.
Persentase Pembentukan Kampung KB Tahun 2018 Menurut Provinsi

Khusus DKI Jakarta disebabkan karena perbedaan target dengan dukungan anggaran pencanangan. DKI Jakarta berhasil mencanangkan 39 Kampung KB sesuai dengan yang dianggarkan, sehingga 49 kampung KB yang tidak dianggarkan namun dicatat sebagai target tahun 2018 tidak dapat dicanangkan.

Kebijakan tahun 2018, BKKBN mendukung program pengentasan stunting, untuk itu diharapkan desa yang teridentifikasi banyak kasus stunting dijadikan Kampung KB. Namun kebijakan tersebut lahir pada tengah tahun 2018, sehingga tidak seluruh desa stunting dapat menjadi kampung KB. Berikut irisan Kampung KB dengan desa stunting menurut provinsi:

Tabel 1.
Irisan Kampung KB dengan Desa Stunting

No	Provinsi	Desa Stunting	Kampung KB yang ada di desa stunting		
			2015-2017	2018	Total
1	Aceh	30	1	18	19
2	Sumut	50	5	11	16
3	Sumbar	30	13	2	15
4	Riau	20	1	8	9
5	Jambi	20	2	10	12
6	Sumsel	20	2	9	11
7	Bengkulu	20	2	17	19
8	Lampung	40	4	35	39
9	Babel	20	3	12	15
10	Kepri	20	2	7	9
11	DKI	6	3	2	5
12	Jabar	140	33	22	55
13	Jateng	120	23	55	78
14	DIY	20	7	11	18
15	Jatim	120	10	79	89
16	Banten	20	2	10	12
17	Bali	20	3	15	18
18	NTB	80	11	54	65
19	NTT	213	24	31	55
20	Kalbar	30	4	17	21
21	Kalteng	30	1	14	15
22	Kalsel	20	2	12	14
23	Kaltim	20	2	16	18
24	Kaltara	20	2	7	9
25	Sulut	20	1	9	10
26	Sulteng	20	0	10	10
27	Sulsel	20	3	12	15
28	Sultra	20	1	10	11
29	Gorontalo	30	5	20	25
30	Sulbar	40	3	17	20
31	Maluku	30	3	5	8
32	Malut	20	6	5	11
33	Papua	220	9	15	24
34	Papua Barat	51	1	20	21
	Jumlah	1600	194	597	791

“Kampung KB turut serta dalam upaya pencegahan dan pengentasan stunting di Indonesia.”



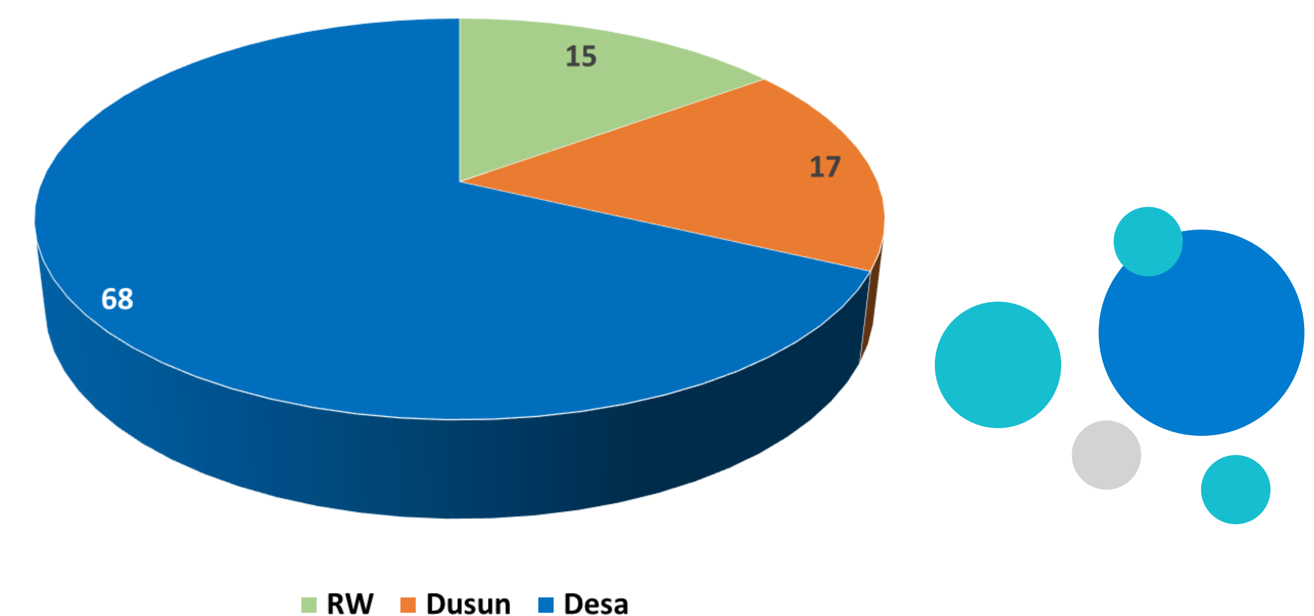
Di antara kegiatan yang ada di Kampung KB untuk mencegah dan mengentasan stunting berupa pemahaman kepada keluarga yag memiliki anak balita terkait pola pengasuhan dan pola makan yang sehat untuk mencegah stunting bagi bayi.

Kampung KB yang semula berada pada tingkat dusun/ RW, namun pada tahun 2018 pada saat Rakernas BKKBN pada bulan Februari 2018 di Hotel Sahid, Pimpinan BKKBN mengarahkan agar Kampung KB berada di tingkat desa.

Saat ini jumlah Kampung KB menurut cakupan wilayah sebagai berikut:

Enam puluh delapan persen Kampung KB mencakup level desa, 17 persen di tingkat Dusun dan 15 persen di tingkat RW.

Gambar 3.
Persentase Kampung KB menurut Cakupan Wilayah



> "Kampung KB akan berdampak langsung kepada pengembangan status desa dan kelurahannya"

Perubahan cakupan Kampung KB di level desa memiliki keuntungan dan konsekuensi untuk pengelolaan Kampung KB. Salah satu keuntungannya adalah kampung KB merupakan kegiatan membangun desa secara holistik dengan intervensi dari berbagai pihak. Membangun Kampung berarti membangun desa, membangun desa berarti membangun keluarga, masyarakat dan Kampung KB. Harapannya dengan terpilihnya desa/kelurahan sebagai Kampung KB, akan berdampak langsung kepada pengembangan status desa dan kelurahannya. Di sisi lain, kendalanya adalah semakin luas cakupan wilayah semakin sulit untuk menggerakan masyarakat.





B. Pokja sebagai Penggerak di Kampung KB

Pokja merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan sama untuk membangun dan mengembangkan Kampung serta berkomitmen tinggi untuk menggerakan masyarakat menuju keluarga dan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera. Adapun kegiatan yang dilakukan pokja adalah rapat perencanaan, koordinasi dan sosialisasi, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian rencana kerja.



> "Pemilihan pokja yang perpengaruh dan mampu mempengaruhi merupakan salah satu kunci kemudahan dalam penggerakan di Kampung KB"

Berikut distribusi Kampung KB menurut kepemilikan Pokja

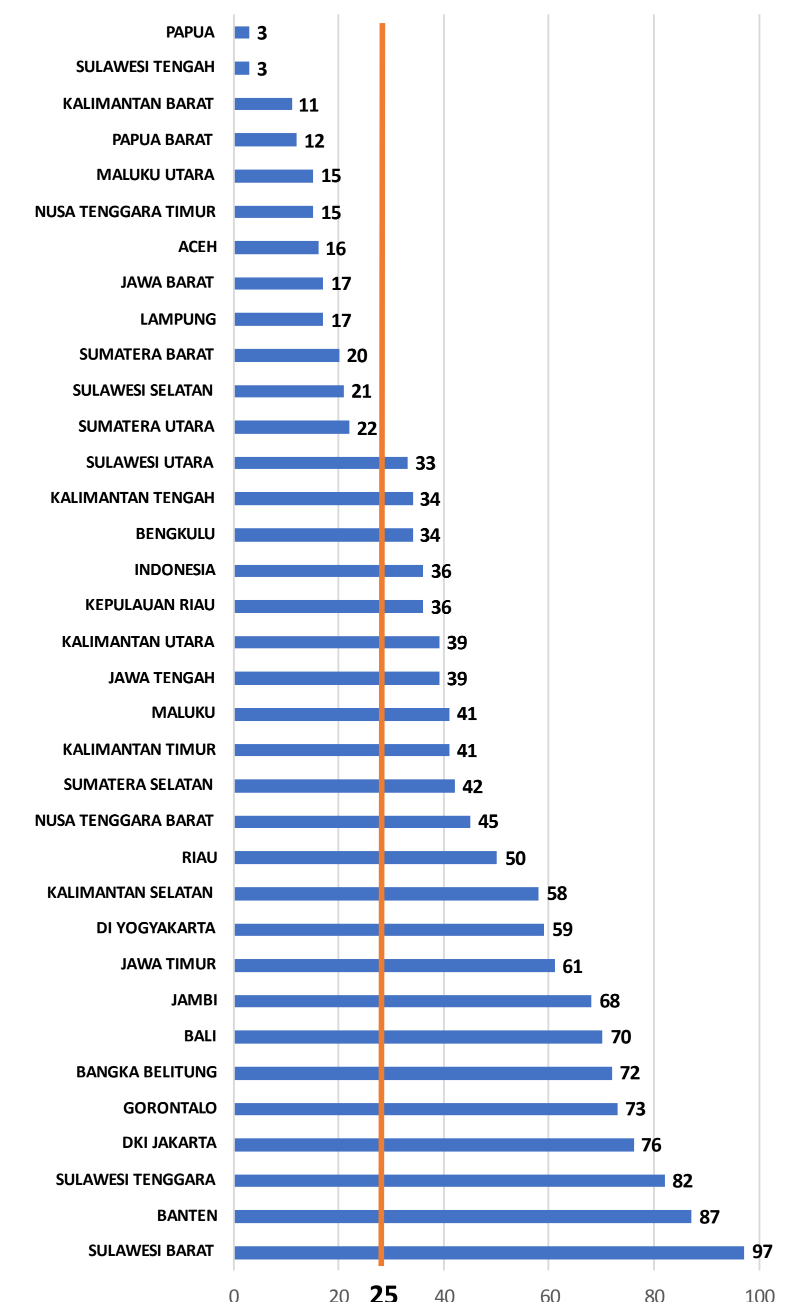
Berdasarkan grafik kepemilikan pokja, tampak ada 4.950 Kampung KB atau setara dengan 36 persen dari total kampung KB yang memiki pokja, 8 persen menyatakan belum memiliki dan 55 persen belum mengisi informasi kepemilikan pokja.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pokja, perlu didampingi dan dibina oleh Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB secara intensif dan OPDKB/BKKBN secara berkala. Salah satu upaya yang dilaksanakan untuk memberikan pemahaman bagi pengelola Kampung KB di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah dilaksanakan berbagai pelatihan dan sosialisasi Kampung KB. Upaya lain dengan menetapkan satu Kampung KB Percontohan di setiap provinsi sebagai pusat pembelajaran bagi Kampung KB lainnya. Untuk menyiapkan dan lebih memantaskan Kampung KB tersebut yang difungsikan sebagai contoh yang akan menginspirasi Kampung KB lainnya, maka pada pada tahun 2018 dilaksanakan workshop pengelolaan Kampung KB bagi 34 TIM Kampung KB Percontohan.

Pada workshop tersebut kami mengundang Kasi Hubalila Perwakilan BKKBN, PKB, Pokja Kampung KB, Kepala Desa yang membina Kampung KB. Materi yang disampaikan pada workshop ini adalah konsep dasar, pengelolaan Kampung KB (dari perencanaan s.d monitoring dan evaluasi) dan ditambah dengan materi pelayanan prima.

> "Kampung KB Percontohan adalah pusat pembelajaran yang siap menginspirasi Kampung KB lainnya"

Gambar 4.
Persentase Kampung Kb menurut Kepemilikan Pokja





C. Intervensi Kegiatan Kampung KB

Kegiatan di Kampung KB bertujuan meningkatkan intensitas kegiatan bidang kependudukan, pelayanan KB dan pembangunan keluarga melalui kelompok kegiatan (BKB, BKR, PIK R/M, BKL dan UPPKS) serta lintas sektor dengan pendekatan dan penguatan pada pelaksanaan 8 fungsi keluarga agar mewujudkan keluarga dan masyarakat sejahtera. Berdasarkan pengamatan dan laporan pada tahun 2018 geliat pelaksanaan Program KKBPK di Kampung KB sudah tampak dan membuahkan hasil.

Begitu pula pelaksanaan kegiatan lintas sektor di Kampung KB, sangat variatif tergantung kepada kebutuhan masyarakat dan kemampuan masing-masing pendamping dan pengelola Kampung KB dalam mengadvokasi lintas sektor untuk berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan dan pengentasan masalah di Kampung KB. Misalnya kegiatan pendidikan anak usia dini oleh Dinas Pendidikan; kegiatan pembuatan akta kelahiran oleh Dinas Dukcapil; kegiatan pelayanan kesehatan dan imunisasi dari Dinas Kesehatan; kegiatan pelatihan kewirausahaan dilakukan kerjasama dengan Disperindag, Disnakersos, Dinas Pertanian dan Perikanan; kegiatan pembangunan fisik dari Dinas PU, Dinas Perhubungan; penataan lingkungan, pembuatan nama gang dilakukan oleh Pemerintahan Desa.

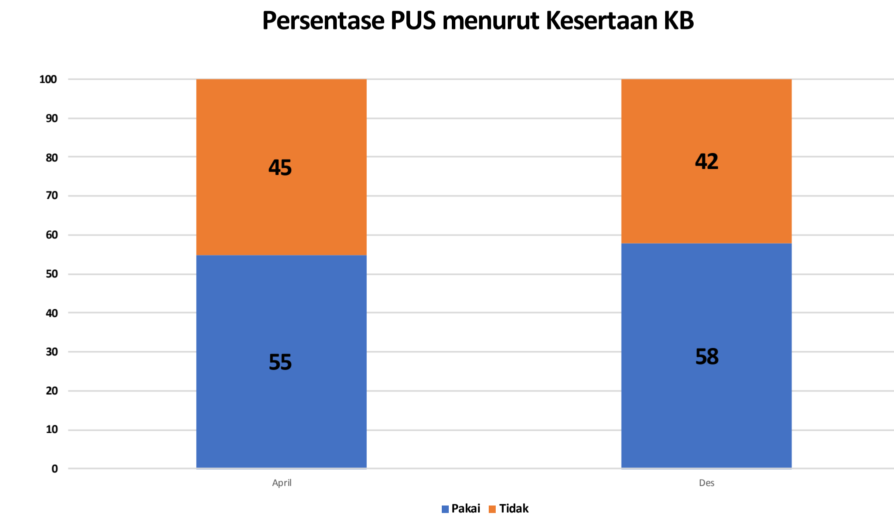
Hampir seluruh provinsi telah berhasil melibatkan berbagai macam mitra untuk secara bersama-sama melakukan berbagai kegiatan dan dukungannya di Kampung KB. Pemerintah desa dan kelurahan, Dinas kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil, Dinas Pertanian, dan Kantor Perwakilan Agama merupakan mitra kerja utama yang hampir di seluruh provinsi terlibat aktif di Kampung KB.

Sumber dana untuk operasional Kampung KB selama tahun 2018 bersumber dari dana APBN yang didistrubusikan oleh BKKBN untuk pembentukan dan pencanangan, kemudian dukungan lain bersumber dari lintas sektor dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang diintegrasikan di Kampung KB. Dibeberapa Kampung KB juga terdapat sumber dari APBD dan Dana Desa untuk operasional Kampung KB khususnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dst. Sedangkan berdasarkan laporan BOKB Desember 2018, realisasi nasional untuk Kampung KB sebesar 58 persen. Selain sumber-sumber di atas, terdapat beberapa Kampung KB yang juga didukung oleh dana Corporate Social Responsibility dari perusahaan, seperti Kampung KB di Kalimantan Timur.



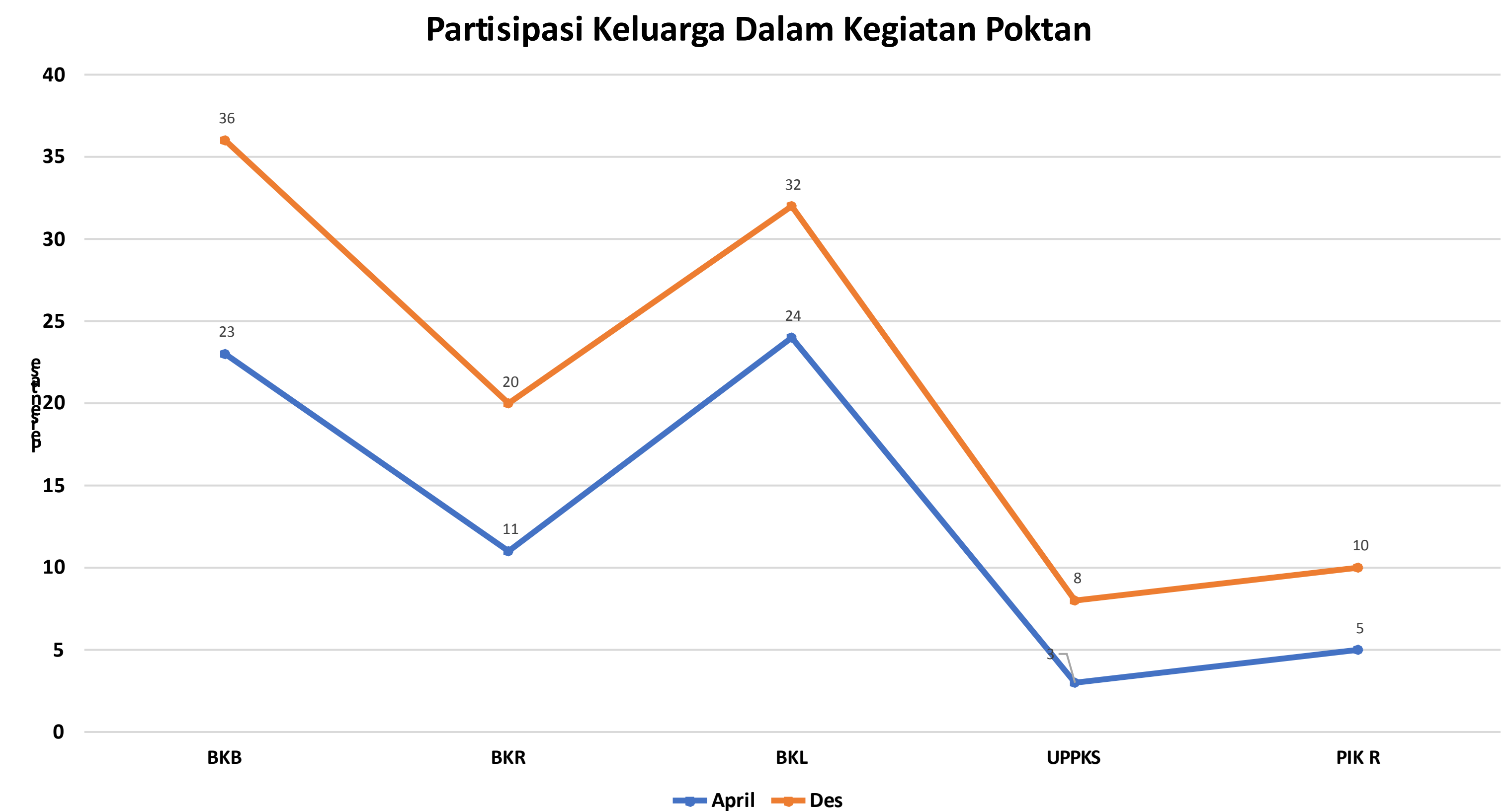
D. Capaian Program KKBPK di Kampung KB

Berdasarkan pengamatan dan pengolahan laporan capaian Program KKBPK yang diisi pada website Kampung KB, tampak ada peningkatan kuantitas pengguna kontrasepsi dan partisipasi keluarga dalam kegiatan poktan yang dibandingkan antara bulan April 2018 dengan capaian bulan Desember 2018.



Berdasarkan Laporan yang disampaikan, tampak ada peningkatan kesertaan KB anatara bulan April dan Desember 2018.

Begitu pula dengan partisipasi sasaran kelompok kegiatan terhadap kegiatan masing-masing Poktan.



E. Permasalahan Pengelolaan Kampung KB

Capaian pembentukan dan pencanangan Kampung KB secara nasional dapat dikatakan cukup berhasil, seluruh kecamatan dan 50 persen desa sangat tertinggal dan tertinggal telah memiliki Kampung KB. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui kunjungan lansung, wawancara, observasi lapangan serta analisis laporan Kampung KB, permasalahan yang dihadapi sebagian besar adalah **sistem pengelolaan Kampung KB**. Khususnya tindak lanjut pasca pencanangan, secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah langkah untuk merancang struktur formal, menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang dan pendelegasian wewenang oleh pemimpin kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Dalam hal pengelolaan Kampung KB, pengorganisasian diwujudkan kedalam susunan Kelompok Kerja (Pokja). Harapannya pokja Kampung KB dibentuk secara berjenjang dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa. Dibeberapa wilayah, seperti Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan beberapa provinsi lain yang memiliki pokja di tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah paham tentang manfaat kampung KB terlihat penggerakan dan pengintegrasian kegiatan di kampung KB lebih baik dibanding wilayah yang tidak memiliki pokja. Kondisi saat ini, masih banyak kabupaten kota yang belum memiliki pokja.

Jika di tingkat provinsi dan kabupaten kota permasalah pengorganisasian terletak pada keberadaan pokja, pada tingkatan desa permasalahan pengorganisasian Kampung KB lebih banyak kepada:



a. Pemilihan pokja

Sebagian besar pemilihan pokja di tingkat desa kurang memperhatikan tentang potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, sehingga banyak SDM potensial yang belum terlibat dalam kepengurusan Kampung KB.

b.Pemahaman tentang tugas dan fungsi

Sebagian pokja Kampung KB, belum paham tentang tugas dan fungsi mereka dalam kepengurusan. Hal ini juga berdampak kepada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

c. Kompetensi anggota pokja dalam pengelolaan Kampung KB

Personal yang terlibat dalam kepengurusan Kampung KB tidak terbiasa dengan kegiatan organisasi. Sebagian besar mereka adalah relawan yang memiliki perhatian dan minat yang tinggi untuk membantu dan berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Semangat untuk memberi arti kepada masyarakat adalah modal utama pokja saat ini, meskipun pengetahuan dan keterampilan berorganisasinya masih perlu ditingkatkan.



b. Tindak lanjut rencana kerja

Gairah dan semangat pokja untuk melakukan berbagai kegiatan di Kampung KB ditunjukan dengan berbagai kegiatan, namun tidak sedikit pokja mengalami kebingungan langkah apa yang harus dilakukan pasca menuangkan berbagai gagasan dalam rencana kerja.

Bimbingan untuk menuangan rencana kerja dalam proposal kegiatan belum pernah diperoleh oleh pokja. Peran PKB/PLKB serta OPDKB sebagai pembimbing, pendamping bahkan marketing kegiatan Kampung KB sangat dibutuhkan, karena jejaring pokja kepada jalur pemerintah di berbagai sektor sangat terbatas.

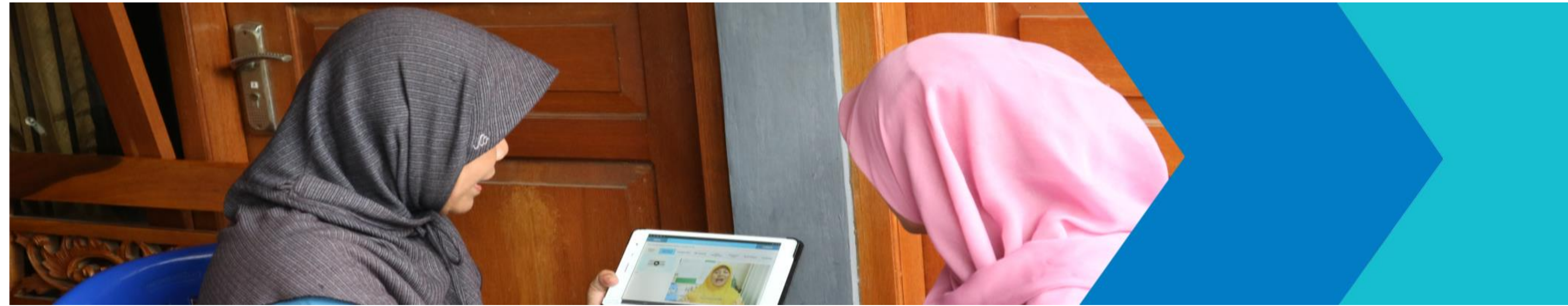
2. Mekanisme Operasional

a. Perencanaan

Kegiatan di Kampung KB belum dilaksanakan berdasarkan hasil perencanaan yang baik. Tahapan dalam proses perencanaan yang semestinya diawali dengan analisis masalah dan potensi desa berdasarkan data, observasi maupun dengar pendapat; penentuan perioritas masalah; dan perencanaan belum melibatkan masyarakat.

Dengan tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan mengakibatkan beberapa kegiatan tidak berdasarkan kebutuhan utama masyarakat, sehingga berdampak kepada rendahnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan.





c. Penggerakan
Penggerakan adalah suatu upaya menumbuhkan motivasi untuk ikut terlibat aktif melakukan upaya-upaya tertentu kearah perubahan yang positif pada diri manusia dan lingkungan sekitar.

Upaya penggerakan di Kampung KB perlu diperkuat, baik untuk pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama maupun masyarakat. Kemampuan pokja untuk melakukan penggerakan perlu diperkuat, mulai dari penentuan sasaran, isi pesan, metode maupun media yang digunakan. Hal penting dalam penggerakan ini adalah kemampuan untuk meyakinkan berbagai pihak tentang manfaat kampung KB.

d. Penganggaran
Sebagian besar wilayah masih mengungkapkan keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala bagi mereka untuk melakukan berbagai kegiatan di Kampung KB. Namun tidak sedikit pula pokja Kampung KB yang sudah paham tentang cara penggalangan dana dari berbagai sumber.

3. Intervensi Kegiatan
Geliat kegiatan program KKBPK maupun kegiatan lintas sektor di Kampung KB sudah dapat dirasakan oleh masyarakat. Menggeliatnya kegiatan di Kampung KB di dukung dana stimulan BOKB Kampung KB maupun wujud komitmen lintas sektor dan pemerintah desa

Intervensi kegiatan lintas sektor sudah terlaksana di Kampung KB, meski tidak sedikit kendala dalam proses pengintegrasian kegiatan. Diantara kendala yang dihadapi adalah sulitnya mengadvokasi pemerintah daerah untuk terlibat aktif dan berkontribusi pada kegiatan di Kampung KB, hal ini disebabkan salah satunya karena faktor nama KAMPUNG KB yang sangat kental dengan nuansa BKKBN. Namun pasca tengah tahun 2017 proses menyakinkan lintas sektor tentang filosofi Kampung KB yang ingin secara bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan cukup berhasil, terbukti dengan peran serta lintas sektor dalam kegiatan di Kampung KB.

Mengamati kegiatan yang telah terlaksana, kegiatan di Kampung lebih banyak kepada hal-hal yang bersifat fisik. Untuk kegiatan non fisik yang dilaksanakan sebagian besar kurang menyasar kepada kebutuhan masyarakat, kegiatan banyak atas inisiatif OPDKB dengan memanfaatkan dana BOKB. Intervensi di Kampung KB seyogyanya berupa pembekalan keterampilan keluarga dan masyarakat yang sesuai dengan potensi yang dimiliki.

4. Pencatatan dan Pelaporan
Sistem pelaporan Kampung KB dilakukan secara online melalui website kampungkb.bkkbn.go.id. Setiap kampung memiliki subsite sendiri yang memuat profil masing-masing kampung, dilaporkan oleh PKB/PLKB langsung setelah pelaksanaan kegiatan.

Memperhatikan laporan kampung KB, dari total Kampung KB yang terlapor yaitu sebanyak 13.606 yang melakukan pelaporan konten pelaporan yang lengkap baru sekitar 45 persen. Rendahnya cakupan pelaporan disebabkan karena PKB/PLKB masih banyak yang belum faham tentang pengisian laporan online, selain juga karena kesulitan jaringan internet.

5. Monitoring dan Evaluasi (Monev)
Monitoring dan evaluasi Kampung KB menjadi salah satu yang dibutuhkan untuk mengetahui perkembangan dan keberhasilan Kampung KB. Permasalah di lapangan adalah terbatasnya kegiatan monev dan pembinaan yang dilakukan secara berjenjang, kemungkinan disebabkan karena terbatasnya sumber daya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pelaksanaan monev masih dilakukan secara parsial dan belum melibatkan lintas sektor. Sedangkan pemanfaatan hasil monev juga belum secara optimal untuk pengembangan dan perbaikan program.

F. Solusi Permasalahan

Memperhatikan masalah yang dihadapi, upaya pengentasan masalah yang telah dilakukan diantaranya menyediakan panduan teknis, monitoring dan pembinaan, pelatihan/workshop/sosialisasi serta video tutorial. Secara lebih rinci,sebagai berikut:

1. Pengorganisasian
   a. Pemilihan pokja
   Pemilihan pokja merupakan langkah utama yang sangat strategis untuk keberlangsungan dan keberhasilan pengelolaan Kampung KB. Menginformasikan tips dan trik pemilihan pokja kepada pengelola Kampung KB, yaitu:
   Melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pemilihan pokja Kampung KB;
   Memilih personal yang berpengaruh dan mampu mempengaruhi;
   Melibatkan seluruh potensi desa, baik dari kader binaan BKKBN, maupun dari dinas/instansi lain, pendamping lokal desa, karang taruna, kelompok wanita tani, dst;
   Memilih personal dari berbagai lintas usia, keminatan dan pekerjaan tanpa membedakan jenis kelamin.

Di tingkat provinsi dan kabupaten kota juga telah dilaksanakan workshop bagi Tim Advokasi Program KKBPK untuk mendukung segala kegiatan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga di masing-masing tingkatan, salah satu diantaranya Kampung KB.



b. Pemahaman tentang tugas dan fungsi
Menjelaskan tentang tupoksi pokja dalam buku panduan Kampung KB, kemudian disampaikan dalam berbagai pelatihan dan sosialisasi. Workshop pengelolaan Kampung KB juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan anggota pokja dalam melaksanakan tugasnya sebagai penggerak Kampung. Dalam prakteknya di lapangan pokja didampingi oleh PKB/PLKB.





2) Menyediakan Kampung KB Percontohan
Kampung KB Percontohan dipilih dan dikondisikan sebagai pusat pembelajaran bagi kampung KB di sekitarnya. Kampung KB Percontohan diharapkan dapat menginspirasi Kampung KB lain dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.

3) Pembinaan dan pendampingan oleh PKB/PLKB
PKB dan PLKB adalah perwakilan BKKBN yang bertugas sebagai tenaga penggerak di tingkat lini lapangan. Sebagai perwakilan BKKBN di lini lapangan, maka PKB/PLKB memiliki kepentingan yang sama untuk memastikan bahwa kegiatan di Kampung KB dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan Kampung KB dan peningkatan peogram KKBPK.

b.Kompetensi pokja dalam pengelolaan Kampung KB
Upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kompetensi pokja diantaranya:

1) Workshop
Mengingat sebagian besar pokja tidak terbiasa dengan kegiatan organisasi, maka dilaksanakan workshop peningkatan kompetensi Tim Kampung KB termasuk diantaranya pokja. Workshop diberikan kepada tim Kampung KB Percontohan terkait materi:

a) Cara menganalisis data, sehingga menemukan masalah dan perioritas masalah serta potensi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut;
b) Membuat rencana kerja yang strategis untuk mengatasi perioritas masalah yang telah ditetapkan;
c) Menindaklaanjuti rencana kerja ke dalam proposal kegiatan, termasuk didalamnya membuat rencana anggaran yang dibutuhkan;
d) Melakukan penggerakan masyarakat dengan isi pesan dan cara yang tepat;
e) Melakukan pencatatan dan pelaporan setiap kegiatan;
f) Melakukan monev kegiatan.



2. Mekanisme Operasional
Melakukan pembinaan ke Pengelola Kampung KB terkait pelaksanaan mekanisme pengelolaan.

a. Perencanaan
Tahap awal dalam sebuah sistem managerial adalah perencanaan. Perencanaan yang baik akan sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan. Pada tahap ini pendampingan dan informasi dari PKB/PLKB dan OPDKB juga sangat penting terkait program dan kegiatan unggulan instansi/dinas sektor lain yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi untuk penyelesaian masalah Kampung.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan pada tahap perencanaan ini diantaranya:
Melibatkan masyarakat;
Melakukan analisis masalah dan potensi desa dengan menggunakan data;
Menentukan perioritas masalah yang akan segera diatasi;
Membuat perencanaan kegiatan yang merujuk kepada upaya penyelesaian perioritas masalah dengan mempertimbangkan target sasaran, waktu dan komponen yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

b. Tindak lanjut rencana kerja
Setelah rencana kerja tersusun, maka langkah selanjutnya adalah:
Pembuatan proposal kegiatan;
Pendampingan dan penyaluran proposal kegiatan;
Setelah proposal kegiatan bibuat oleh pokja Kampung KB, maka proposal tersebut harus diajukan kepada kepala desa atau OPD teknis yang berhubungan dengan rencana kegiatan tersebut. Namun mengingat dan memperhatikan bahwa jejaring pokja terbatas, maka penyaluran proposal semestinya dapat dibantu oleh PKB/PLKB maupun OPDKB kabupaten kota.
Koordinasi lintas sektor
Fungsi koordinasi dilakukan oleh OPDKB kabupaten kota untuk penggalangan komitmen pemerintah daerah maupun OPD teknis lain.





c. Penggerakan
Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah penggerakan Kampung KB diantaranya:
Pendampingan bagi pokja;
Penyediaan materi dan media KIE;
Melakukan kegiatan terpadu;
Melakukan advokasi, sosialisasi dan KIE secara masif, kreatif dan inovatif.

d. Penganggaran
Memberikan informasi berbagai macam sumber dana dan cara memperolehnya. Beberapa sumber dana yang dapat dimanfaatkan diantaranya:
Dana masyarakat, karena ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dalam membangun kampungnya, maka sumber utama yang perlu diberdayakan adalah dana masyarakat;
Dana desa;
Dana CSR Perusahaan disekitar Kampung;
Dana APBD, termasuk Dana BOKB Kampung KB;
Dana APBN;



3. Intervensi Kegiatan
Meski ada kendala, namun akhir tahun 2018 dapat dikatakan bahwa intervensi kegiatan lintas komponen di BKKBN maupun lintas sektor sudah dapat berjalan. Meski untuk menjaga dan menambah komitmen semua pihak, maka langkah yang dapat dilakukan diantaranya:
Advokasi yang terus menerus;
Upayakan lintas sektor juga memiliki target program di Kampung KB;
Libatkan dalam kegiatan langsung, tidak hanya berfungsi sebagai menyandang dana



4. Pencatatan dan Pelaporan
Memberikan buku panduan teknis, melatih Kasi Hubalila Perwakilan BKKBN, sosialisasi penggunaan aplikasi melalui beberapa saluran seperti pertemuan langsung, video tutorial, tutorial via sosial media (facebook, instagram dan youtube).

Akan memberikan reward bagi Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB yang aktif dalam pengisian aplikasi pelaporan, serta tentunya akan berdampak pada pencapaian angka kredit PKB.

5. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring telah dilaksanakan dengan kunjungan langsung maupun dengan menganalisis perkembangan Kampung KB melalui data laporan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan bersurat kepada perwakilan provinsi. Hasil Monitoring selalu ditindak lanjuti dengan pembinaan sesuai dengan kebutuhan.



G. Rencana Tindak Lanjut Pengembangan

Setelah dilaksanakan upaya pengentasan masalah, tidak seluruh masalah berhasil diselesaikan dengan baik. Diantara masalah yang masih perlu perhatian bersama adalah:

1. Pertemuan pokja di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota.
Untuk tingkat pusat, provinsi dan kab kota perlu ada forum pertemuan rutin antar komponen, maupun secara berkala dengan lintas sektor membahas tentang perkembangan Kampung KB. Mengaktifkan tim advokasi program KKBPK di tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk perolehan dukungan dari pemerintah daerah.

2. Workshop/pelatihan/sosialisasi pengelolaan Kampung KB
Bekerjasama dengan PULAP untuk melakukan pelatihan pengelolaan Kampung KB bagi Tim Kampung KB Percontohan tingkat kabupaten kota sebanyak 514 tim. Diharapkan pasca pelatihan agar pengelola di tingkat provinsi dan kabupaten kota agar terus menjaga mutu Kampung KB Percontohan dan menularkannya bagi Kampung KB lainnya.

3. Pembinaan dan pendampingan oleh PKB/PLKB
Perlu peningkatan kualitas tenaga lini lapangan BKKBN, mengingat PKB dan PLKB sebagai pendamping Kampung KB dan Pembina IMP. Selain PKB/PLKB, optimalisasi peran IMP juga perlu menjadi agenda bersama.

4. Optimalisasi pemanfaatan dana intervensi kegiatan
Pelaksanaan kegiatan di Kampung KB, dapat bersumber dari berbagai sumber dana. Agar pelaksanaannya berdampak kepada keluarga dan masyarakat dalam jangka panjang, maka perlu perencanaan kegiatan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

5. Pelaporan
Pelaporan merupakan salah satu dasar dalam mengevaluasi perkembangan program. Memperhatikan muatan laporan tidak hanya memuat jumlah Kampung KB, maka perlu perhatian bagi semua pihak agar mendorong PKB/PLKB/pengisi konten untuk melaporkan capaian-capaian yang di Kampung KB.

6. Monitoring dan Evaluasi
Agar monev memberikan arti untuk pengembangan program, maka beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya:
- Dilakukan rutin dan berkala;
- Melalui forum rapat koordinasi (rakor) desa maupun kecamatan;
- Menggunakan panduan monev ataupun daftar tilik;
- Melibatkan lintas sektor.



KESIMPULAN

SARAN

BAB III KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan laporan dan pembahasan, kondisi perkembangan Kampung KB saat ini adalah:

1. Perlu penguatan tentang pengelolaan Kampung KB;
2. Optimalisasi kegiatan yang berdampak pada peningkatan program KKBPK dan peningkatan kualitas keluarga dan masyarakat;
3. Perlu monitoring dan evaluasi secara berkala dan terpadu, guna memberikan feedback sebagai dasar pengembangan program.

Harapannya dengan pengelolaan yang baik dan melembaga, secara tidak langsung semua pihak yang terlibat dalam Kampung KB telah berkontribusi dalam upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat kampung.

Berdasarkan hasil monev dapat kami simpulkan bahwa kunci keberhasilan Kampung KB adalah:

1. Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah;
2. Pemanfaatan data dalam mengetahui peta masalah dan potensi desa;
3. Partisipasi aktif masyarakat;
4. Integrasi lintas komponen dimulai dari:
   a. Pembentukan Pokja
   b. Penentuan Masalah
   c. Penentuan target berdasarkan masalah
   d. Pembuatan rencana kerja
   e. Penggerakan masyarakat
   f. Pencatatan dan pelaporan
   g. Monev dan pembinaan

A. Rekomendasi

Memperhatikan masalah dan solusi yang telah dibahas di atas, maka beberapa rekomendasi yang kami catat adalah:

1. BKKBN
   Sebagai lembaga teknis yang menggawangi pelaksanaan Kampung KB, maka seluruh komponen yang ada di BKKBN harus secara bersama-sama mendukung dan menyukseskan Kampung KB sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimulai dari keluarga sebagaimana tugas dan fungsinya di masing-masing komponen.
2. Kementerian Koordinator Bidang Pemangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
   a. Bersama-sama dengan BKKBN mendorong lahirnya berbagai produk hukum tentang optimalisasi Kampung KB;
   b. Memberikan izin penerbitan Pedoman Integrasi Kampung KB yang telah disusun secara bersama-sama dengan lintas sektor;
   c. Mengayomi dan memotivasi berbagai lintas sektor untuk turut serta dalam upaya menyejahterakan masyarakat di Kampung KB.





PERKEMBANGAN KAMPUNG KB MENURUT PROVINSI



PROVINSI ACEH

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Aceh sampai dengan tahun 2018 sebanyak 583 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Aceh adalah Kampung KB Tjut Nyak Dhien (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/3992). Tidak hanya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Kampung KB ini pihak BUMN sudah terlibat, diantaranya BNI menjadi salah satu sponsor untuk kegiatan penataan lingkungan Kampung.



Pertemuan kelompok kerja



Pelatihan BKL



Pemeriksaan Kesehatan Lansia



Kegiatan Rumah DataKU



Pelatihan BKL

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Sumatra Utara sampai dengan tahun 2018 sebanyak 804 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Sumatra Utara adalah Kampung KB Mulia Sejati (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/6439).

Dalam profil tampak bahwa kesertaan masyarakat dalam kegiatan poktan cukup baik khususnya kegiatan di BKB dan BKL. Upaya peningkatan kegiatan di UPPKS perlu ditingkatkan, karena melalui kegiatan di kelompok UPPKS keluarga dan masyarakat memperoleh bekal dan jalur untuk peningkatan pendapatan keluarga.

Berdasarkan laporan intervensi juga tampak kerjasama dengan PUPR terkait pembuatan drainase, PKK untuk penataan lingkungan hidup, Dukcapil untuk penyediaan akte kelahiran, Dinas Kesehatan untuk *fogging* sebagai pencegahan demam berdarah, dan masih banyak yang lainnya.



Kegiatan Penanaman Bunga



Pelayanan Posyandu



Penyerahan Akte Kelahiran Gratis Kepada Warga

PROVINSI SUMATERA BARAT

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Sumatra Barat sampai dengan tahun 2018 sebanyak 373 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Sumatra Barat adalah Kampung KB Berok Gunung Pangilun (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/1241).

Kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB ini tidak hanya terkait program KKBPK tetapi kegiatan lintas sektor serta partisipasi masyarakat di Kampung KB ini juga cukup baik. Diantaranya dari Kelurahan, Lembaga Pendidikan, PUPR, dst.



Kegiatan Goro Massal



Rapat Persiapan Gebyar Kampung KB



Pemberian Bibit Sayuran Oleh Mahasiswa UNITAS

PROVINSI RIAU

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Riau sampai dengan tahun 2018 sebanyak 307 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Riau adalah Kampung KB Berkah Bersama (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/11675).

Dalam profil tampak bahwa kesertaan masyarakat dalam kegiatan poktan menunjukan perkembangan yang terus membaik. Pembinaan poktan dan IMP juga berjalan secara rutin, Kampung KB Berkah Bersama menunjukan geliat kegiatan yang positif, tidak hanya dari program KKBPK juga dari lintas sektor seperti dari Disnaker untuk pelatihan kewirausahaan, PKK, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan dan masih banyak yang lainnya.



Pencanangan PKK KB KES



Konseling PPKS



Penyerahan BKL KIT

PROVINSI JAMBI

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2018 sebanyak 203 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Jambi adalah Kampung KB Maju Bersama (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/4031).

Kegiatan yang banyak dilaksanakan adalah kegiatan yang bersifat pengelolaan lingkungan dan pembangunan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan poktan. Salah satu lintas sektor yang sering berkontribusi di Kampung Kb Maju Bersama adalah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk membuat Tanaman Obat Keluarga dan pengelolaan sampah.



Rapat Pengurus POKJA



Pertemuan BKR Bougenville Ceria



Penyuluhan Tentang Kesehatan Oleh Dokter Muda Puskesmas



Pembukaan Pelayanan KB Bergerak



PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2018 sebanyak 408 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Sumatera Selatan adalah Kampung KB Layang Layang terletak di Kelurahan 29 Ilir terletak di 2 RW yaitu RW 08 dan RW 09 memiliki kunggulan dengan banyaknya dukungan dana dari CSR http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/6339 selain itu di Sumatera Selatan juga memiliki Kampung KB Sido Rejo (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/9151).

Dalam profil tampak bahwa kesertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan poktan tampak aktif. Kegiatan lintas sektor seperti dari Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Kantor Perwakilan Agama dan masih banyak yang lainnya.



Pertemuan Forum Musyawarah Kampung KB



Pertemuan Forum Musyawarah Kampung KB



Pertemuan POKJA



Ppenyampaian Materi Ketahanan Pangan



PROVINSI
BENGKULU

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Bengkulu sampai dengan tahun 2018 sebanyak 258 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Bengkulu adalah Kampung KB Sumber Jaya (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/9170).

Selain kegiatan program KKBPK, tampak juga kegiatan lintas sektor, seperti peresmian taman baca dari Universitas Bengkulu, pelestarian dan penambahan kawasan hutan mangrove, pembuatan taman dan halam parkir pagi pengunjung hutan mangrove oleh PUPR, dan masih banyak kegiatan lainnya.



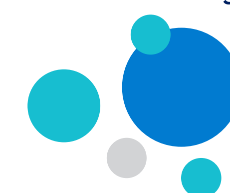
Kader IMP Yang Masuk 10 Besar



Penyampaian Materi Kerajinan oleh Praktisi Kerajinan



Pemasangan Implan Kepada Akseptor





Pertemuan Musrembang Dipimpin langsung Oleh Lurah

PROVINSI LAMPUNG

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2018 sebanyak 457 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Lampung adalah Kampung KB Buring Kencana (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/9170).

Selain kegiatan program KKBPK, tampak juga kegiatan lintas sektor, seperti pemberian kloset jongkok dari Dinas Kesehatan, pemberian bibit tanaman dari Dinas Pertanian, buku bacaan dari Kemenang Lampung Utara, oven gas dan tabung gas dari Dinas Sosial, Alat rebana Dari TP-PKK Kabupaten, alat Olahraga dari Dinas Pemuda dan Olahraga, Bibit Ikan Dari Dinas Perikanan, Buku Bacaan dari BKKBN Perwakilan Prov.Lampung untuk Rumah Dataku, pengerasan jalan oleh PUPR.



Sambutan Bupati Lampung Utara



Pelayanan KB Kerjasama dengan KODIM



Penilaian Tim PKK



Deklarasi Desa Bebas ODF

PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Bangka Belitung sampai dengan tahun 2018 sebanyak 98 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Bangka Belitung adalah Kampung KB Ketapang (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/1543).

Geliat kegiatan program KKBPK di Kampung KB Ketapang sangat baik, begitu juga dengan kegiatan lintas sektor. Diantaranya kegiatan dari Pemerintah Daerah, Dinas Sosial untuk membangun rumah tidak layak huni dan rummah singgah, bantuan untuk ibu hamil dari Pertamina.



Sosialisasi BPJS



Kegiatan Posyandu



Kegiatan BKB dan Balita



Gelar Dagang Produk UPPKS

PROVINSI
KEP. RIAU

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2018 sebanyak 126 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Kepulauan Riau adalah Kampung KB Teluk Uma (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/1813).



Kegiatan Penyuluhan KB



Kegiatan Menanam



Kegiatan Sosialisasi



PROVINSI
DKI JAKARTA

Jumlah Kampung KB yang ada di DKI Jakarta sampai dengan tahun 2018 sebanyak 146 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di DKI Jakarta adalah Kampung KB Marunda (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/2780). Geliat kegiatan program KKBPK di Kampung KB Marunda sangat baik, begitu juga dengan kegiatan lintas sektor. Diantaranya kegiatan dari Dinas Kesehatan untuk pemerikasaan IVA, dari Mc.D untuk lomba mewarnai, dari lembaga pendidikan.



Kegiatan Penimbangan



Sosialisasi NAPZA Kepada Remaja



Kegiatan RPTRA Green Marunda



Kegiatan HARKESNAS



Lomba Mewarnai



PROVINSI
JAWA BARAT

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2018 sebanyak 1431 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Jawa Barat adalah Kampung KB Insan Sejahtera (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/6628). Geliat kegiatan program KKBPK di Kampung KB Insan Sejahter sangat baik, begitu juga dengan kegiatan lintas sektor. Diantaranya kegiatan dari Dinas Kesehatan untuk pemerikasaan IVA, dari lembaga pendidikan, Dinas PMD



Kegiatan Penimbangan



Rapat Rutin



Pembinaan Kader Tribina Oleh UPT



PMT untuk Posyandu



PROVINSI
JAWA TENGAH

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2018 sebanyak 1577 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Jawa Tengah adalah Kampung KB Duta Makmur dan GADIS (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/10838) (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/4730). Geliat kegiatan program KKBPK dan lintas sektor sangat terasa di dua Kampung KB ini.



Kegiatan Penimbangan



Sarapan Bersama Lansia



Paparan Kampung kb



Lomba Anak-anak

PROVINSI JAWA TIMUR

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2018 sebanyak 1342 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Jawa Timur adalah Kampung KB Jambewangi (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/3427). Di Kampung KB ini tampak ada geliat kegiatan program KKBPK dan lintas sektor.



Penyuluhan MOP


Pembinaan BKL



Pelatihan Pengembangan Desa Mandiri Pangan


Pelatihan Keterampiran Kelp. UPPKS



Kunjungan Monev Oleh Biro Kesos Provinsi



PROVINSI D I YOGYAKARTA

Jumlah Kampung KB yang ada di D.I Yogyakarta sampai dengan tahun 2018 sebanyak 160 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di D.I Yogyakarta adalah Kampung KB Jasem (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/1346). Geliat kegiatan program KKBPK, pendidikan dan pemberdayaan sangat terasa di Kampung KB ini.


Paud Games


Pelatihan Pembuatan Pola Jilbab


Kunjungan Ke Rumah Warga yang Sakit


Suasana Kerja Bakti Tamanisasi



PROVINSI BALI

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Bali sampai dengan tahun 2018 sebanyak 121 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Bali adalah Kampung KB Tegal Badeng Barat (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/6081). Di Kampung KB ini tampak ada geliat kegiatan program KKBPK dan lintas sektor.



Kegiatan Outbond dan Senam



Pembinaan BKB dan Posyandu



Pemeriksaan Lansia

PROVINSI BANTEN

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Banten sampai dengan tahun 2018 sebanyak 310 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Banten adalah Kampung KB Waru (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/4735). Di Kampung KB ini tampak ada geliat kegiatan program KKBPK dan lintas sektor.



Sidang Isbat Nikah



Penanaman Bibit



Pelayanan Perpustakaan Keiling

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi NTT sampai dengan tahun 2018 sebanyak 564 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi NTT adalah Kampung KB Kuanheun (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/11399). Di Kampung KB ini tampak ada geliat kegiatan program KKBPK dan lintas sektor.



Penanaman lamtoro terambah untuk pakan ternak



Perbaikan jalan dusun Menggunakan dana desa



Pos baca anak dan remaja kuanheum



Pembinaan Poktan



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi NTB sampai dengan tahun 2018 sebanyak 240 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi NTB adalah Kampung KB Pacu Solah (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/3664). Di Kampung KB ini tampak ada geliat kegiatan program KKBPK dan lintas sektor.



Rapat Penjelasan Kampung KB dan Rencana Kerja



Pemeriksaan Kesehatan Oleh Dinas Kesehatan



Anak-anak yang mendapat Santunan

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2018 sebanyak 334 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Kalimantan Barat adalah Kampung KB Pematang Rambai (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/2691). Di Kampung KB ini tampak ada geliat kegiatan program KKBPK dan lintas sektor.



Pembinaan Kader Kelompok Tri Bina



Pembinaan Pokja Kampung KB Budidaya Ikan Air Tawar



Sosialisasi Kespro

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2018 sebanyak 299 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Kalimantan Selatan adalah Kampung KB Sungai Andai (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/1626). Di Kampung KB ini tampak ada geliat kegiatan program KKBPK dan lintas sektor.



Posyandu Balita Teratai



Pembersihan Sungai



Kegiatan Integrasi Kampung Bersama Mitra



Kegiatan Sosialisasi

PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2018 sebanyak 291 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kampung KB Tanah Mas (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/11083). Di Kampung KB ini tampak ada geliat kegiatan program KKBPK dan lintas sektor.



Peserta Forum Musyawarah



Kegiatan Tali Asih Bagi Lansia Kurang Mampu



Kegiatan Pertemuan Kader Pembentukan PIK Remaja



Kegiatan Gotong Royong

PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan tahun 2018 sebanyak 71 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Kalimantan Utara adalah Kampung KB Pimping (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/7867). Di Kampung KB ini tampak ada geliat kegiatan program KKBPK dan lintas sektor.



Kegiatan Pemberian Materi Parenting Oleh PLKB



Sosialisasi Pengdalian Penduduk dan KB



Persiapan Pertunjukan Seni Tari



Pertunjukan Seni Tari Oleh Anak-anak Desa Pimping

PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2018 sebanyak 203 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Kalimantan Timur adalah Kampung KB Maluang Sejati (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/2556). Di Kampung KB ini tampak ada geliat kegiatan program KKBPK dan lintas sektor.



Pencanangan Kampung Anti Pornografi



Kegiatan PIK R



Sosialisasi BPJS Oleh Dinas Kesehatan



Pemeriksaan Kesehatan



PROVINSI
SULAWESI TENGAH

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2018 sebanyak 338 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kampung KB Lorong Bakso (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/2646). Di Kampung KB ini tampak ada geliat kegiatan program KKBPK dan lintas sektor.



Kegiatan Posyandu



Pertemuan POKJA Kampung KB



Persiapan Lomba Mural dan Duta Lorong



Kegiatan Porseni



PROVINSI
SULAWESI UTARA

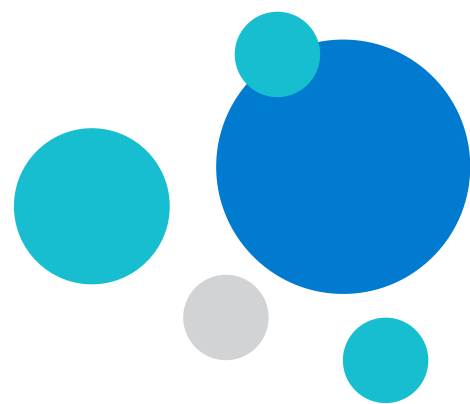
Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan tahun 2018 sebanyak 339 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Sulawesi Utara adalah Kampung KB Gogagoman (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/1236). Di Kampung KB ini tampak ada geliat kegiatan program KKBPK dan lintas sektor.



Pembinaan Kader



Pembinaan Kader Tri Bina



PROVINSI
SULAWESI SELATAN

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2018 sebanyak 615 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kampung KB Nusa Indah Capoa (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/6469). Di Kampung KB ini tampak ada geliat kegiatan program KKBPK dan lintas sektor.



Sosialisasi MKPJ Kepada Ibu Yang Mempunyai Balta



Penyuluhan KB dan Pembinaan CoE BKL



Pembahasan Peran dan Fungsi POKJA



Kerja Bakti Warga



PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2018 sebanyak 430 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Papua adalah Kampung KB Besulutu (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/4457). Berikut kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB Besulutu :



Kegiatan Pembentukan Kampung KB



Integrasi Kampung KB Besulutu



Kegiatan Pertemuan POKJA



Bantuan Untuk UPPKS dari BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara

PROVINSI GORONTALO

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2018 sebanyak 155 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Gorontalo adalah Kampung KB Dulohupa (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/4292). Di Kampung KB ini tampak ada geliat kegiatan program KKBPK dan lintas sektor.

Kegiatan Kerja Bakti





Penyuluhan Kader Kelompok BKL



Pelatihan Posbindu



Kegiatan Pos Gizi

PROVINSI SULAWESI BARAT

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2018 sebanyak 163 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Sulawesi Barat adalah Kampung KB Saletto (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/435). Di Kampung KB ini tampak ada geliat kegiatan program KKBPK dan lintas sektor.



Pembentukan Kelompok PIK Remaja



Posko Pengaduan & Pelayanan Terpadu



Pembangunan Pasar



Kerja Bakti dan Bakti Sosial

PROVINSI MALUKU

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Maluku sampai dengan tahun 2018 sebanyak 219 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Maluku adalah Kampung KB Air Salak (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/3136). Di Kampung KB ini tampak ada geliat kegiatan program KKBPK dan lintas sektor.



Sambutan Sestama BKKBN Saat Berkunjung Ke Kampung KB



Pemberian Materi dari YCCP



Penyuluhan dan Pelayanan KB



Penjelasan Kampung KB

PROVINSI
MALUKU UTARA

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2018 sebanyak 199 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Maluku Utara adalah Kampung KB Maku Sonyinga (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/1869). Di Kampung KB ini tampak ada geliat kegiatan program KKBPK dan lintas sektor.



Diskusi Kegiatan Expo Mini Kampung KB



Pemberian Materi Gizi Buruk Oleh Ketua IBI Malut



Pemberian Masukan Oleh Bhambimkamtibmas dan Ketua PMI



Penjelasan ALOKON Oleh Sub PPKBD



Seksi Kasih Sayang Berbagi Cerita Tentang Expo Mini

PROVINSI
PAPUA BARAT

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Papua Barat sampai dengan tahun 2018 sebanyak 91 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Papua Barat adalah Kampung KB Fafi (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/1342). Di Kampung KB ini tampak ada geliat kegiatan program KKBPK dan lintas sektor.



Sambutan Kepala Distrik dalam Kegiatan Pembinaan Kelompok UPPKS



Kegiatan Pemuktahiran Pendataan Keluarga



Kegiatan Loka Karya Mini

PROVINSI PAPUA

Jumlah Kampung KB yang ada di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2018 sebanyak 424 Kampung KB. Diantara Kampung KB yang dapat dijadikan contoh di Provinsi Papua adalah Kampung KB Binyeri (http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/8560). Di Kampung KB ini tampak ada geliat kegiatan program KKBPK dan lintas sektor.



Kegiatan Launching Rumah DataKU



Penandatangan Prasasti Kampung KB



Kegiatan Pengembangan Center Of Excellent (CoE)



Showroom Kriya & Hasil Olahan dari Dinas Koperasi dan UKM

Sumber Photo

http://detak.co/detail/berita/presiden-jokowi-indonesia-maju-kalau-keluarga-sejahtera

https://acehnews.net/lhok-guci-menjadi-kampung-kb/

http://rri.co.id/makassar/post/berita/527719/daerah/bupati_indah_canangkan_20_kampung_kb_di_luwu_utara.html

https://www.blitartimes.com/baca/170522/20180412/153950/dppkbp3a-kabupaten-blitar-bina-pokja-kampung-kb-di-22-kecamatan/

http://medan.tribunnews.com/2018/12/12/ashari-tambunan-ingatkan-pimpinan-opd-beri-perhatian-lebih-terhadap-kampung-kb

https://sumbar.kabardaerah.com/integrasi-kampung-kb-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-warga/

http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/25330/Kampung_KB_di_Sumedang_Berlanjut

https://www.borneonews.co.id/berita/22150-minim-tenaga-medis-jadi-kendala-program-kb

http://kaltim.tribunnews.com/2018/09/18/pertama-kali-di-indonesia-kampung-maliang-di-berau-resmi-jadi-kampung-bebas-pornografi-anak

https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/aneka-metode-kontrasepsi-hinggap-di-plang-jalan-kota-banjar

http://setkab.go.id/laju-pertumbuhan-penduduk-13-persen-pemerintah-kembali-galakkan-program-kb/

http://www.kampungkbjasem.com/

https://www.jabarpublisher.com/index.php/2016/01/14/agenda-blusukan-batal-jokowi-masih-sempat-resmikan-kampung-kb/

Sumber Photo

Sumber Photo

https://news.okezone.com/read/2018/05/02/1/1893560/wujudkan-kampung-kb-tmkk-nasional-2018-diresmikan-di-kabupaten-hulu-sungai-utara

https://kotabogor.go.id/index.php/show_post/detail/3763/bima-kunjungi-kampung-kb-di-pasir-jaya

https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/aneka-metode-kontrasepsi-hinggap-di-plang-jalan-kota-banjar

http://www.kla.id/sosialisasi-dan-pembentukan-kampung-kb-di-desa-pentian/

https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/02/20/o2twco368-sabang-resmi-punya-kampung-kb

https://wartabalionline.com/index.php/2018/11/06/menko-pmk-canangkan-penarungan-sebagai-kampung-kb/

https://balaidiklatkkbmalang.wordpress.com/2014/08/27/bina-keluarga-balita-bkb/

http://kampungkb.bkkbn.go.id/intervensi/



Daftar Pustaka

1. Indeks Desa Membangun, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, 2015
2. Profil Kemiskinan di Indonesia, BPS, Sep 2015;
3. Riskesdas – 2013
4. Human Development Report, UNDP, 2016

